

# **SKRIPSI**

## **ANALISIS PENGARUH KEBIJAKAN FISKAL, KEBIJAKAN MONETER, DAN PENANAMAN MODAL ASING TERHADAP OUTPUT GAP DI PROVINSI SULAWESI SELATAN**

**MIFTAHUL JANNAH**



**DEPARTEMEN ILMU EKONOMI  
FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS  
UNIVERSITAS HASANUDDIN  
MAKASSAR  
2023**

## **SKRIPSI**

# **ANALISIS PENGARUH KEBIJAKAN FISKAL, KEBIJAKAN MONETER, DAN PENANAMAN MODAL ASING TERHADAP OUTPUT GAP DI PROVINSI SULAWESI SELATAN**

Sebagai salah satu persyaratan untuk memperoleh gelar Sarjana Ekonomi

Disusun dan diajukan oleh

**MIFTAHUL JANNAH**

**A011191120**



Kepada:

**DEPARTEMEN ILMU EKONOMI  
FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS  
UNIVERSITAS HASANUDDIN  
MAKASSAR  
2023**

## SKRIPSI

# ANALISIS PENGARUH KEBIJAKAN FISKAL, KEBIJAKAN MONETER, DAN PENANAMAN MODAL ASING TERHADAP OUTPUT GAP DI PROVINSI SULAWESI SELATAN

Disusun dan diajukan oleh

**MIFTAHUL JANNAH**

**A011191120**

Telah dipertahankan dalam sidang ujian skripsi

Makassar, 31 Juli 2023

Pembimbing I



Prof. Muhammad Amri, SE., MA., Ph.D.  
NIP. 19660118 199002 1 001

Pembimbing II



Dr. Amanus Khalifah Fil'Ardy Yunus, SE., M.Si.  
NIP. 19880113 201504 1 001

Ketua Departemen Ilmu Ekonomi  
Fakultas Ekonomi dan Bisnis  
Universitas Hasanuddin  
  
  
Sabid, SE., M.Si., CWM®  
NIP. 19740715 200212 1 003

## HALAMAN PENGESAHAN

### ANALISIS PENGARUH KEBIJAKAN FISKAL, KEBIJAKAN MONETER, DAN PENANAMAN MODAL ASING TERHADAP OUTPUT GAP DI PROVINSI SULAWESI SELATAN

Disusun dan diajukan oleh

**MIFTAHUL JANNAH**

**A011191120**

Telah dipertahankan dalam sidang ujian skripsi  
Pada tanggal **15 Agustus 2023** dan  
Dinyatakan telah memenuhi syarat kelulusan

Menyetujui,

Panitia penguji

No.	Nama Penguji	Jabatan	Tanda Tangan
1.	Prof. Muhammad Amri, SE., MA., Ph.D.	Ketua	1..... 
2.	Dr. Amanus Khalifah Fil'ardy Yunus, SE., M.Si.	Sekretaris	2..... 
3.	Prof. Dr. Abd. Hamid Paddu, MA., CRP.	Anggota	3..... 
4.	Dr. Indraswati T.A. Reviane, SE., MA., CWM®.	Anggota	4..... 

Ketua Departemen Ilmu Ekonomi



## SURAT PERNYATAAN KEASLIAN

Saya yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : Miftahul Jannah

Nomor Pokok : A011191120

Program Studi : Ilmu Ekonomi

Jenjang : Sarjana (S1)

Menyatakan dengan ini bahwa Skripsi dengan judul ***Analisis Pengaruh Kebijakan Fiskal, Kebijakan Moneter, dan Penanaman Modal Asing terhadap Output Gap di Provinsi Sulawesi Selatan*** adalah karya saya sendiri dan tidak melanggar hak cipta pihak lain. Apabila di kemudian hari Skripsi karya saya ini terbukti bahwa sebagian atau keseluruhannya adalah hasil karya orang lain yang saya pergunakan dengan cara melanggar hak cipta pihak lain, maka saya bersedia menerima sanksi.

Makassar, 17 Agustus 2023

Yang menyatakan

  
Miftahul Jannah  
A011191120

## PRAKATA

Assalamu'alaikum Warahmatullahi Wabarakaatuh.

Alhamdulillahirobbilalamin, segala puji syukur penulis panjatkan kepada Allah SWT. atas segala limpahan rahmat dan karunia-Nya sehingga penyusunan skripsi yang berjudul "Analisis Pengaruh Kebijakan Fiskal, Kebijakan Moneter, dan Penanaman Modal Asing terhadap Output Gap di Provinsi Sulawesi Selatan" dapat diselesaikan dengan baik. Skripsi ini dibuat bukan hanya untuk pemenuhan persyaratan bagi penulis guna mendapatkan gelar sarjana ekonomi pada program studi Ilmu Ekonomi Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Hasanuddin, akan tetapi penulis mengharapkan masalah ekonomi yang penulis kaji dapat tergambar dalam bentuk skripsi sebagai bentuk pengaplikasian ilmu yang telah penulis peroleh selama menjadi mahasiswa ekonomi.

Penulis menyadari bahwa dalam penulisan skripsi ini masih terdapat banyak kekurangan dan kelemahan. Oleh sebab itu, penulis dengan terbuka akan menerima kritik maupun masukan dari pembaca terkait tulisan ini agar skripsi ini dapat berguna lebih baik lagi bagi para pembaca. Karya tulis ini diharapkan mampu memberikan banyak pembelajaran terkait masalah yang diteliti serta membangkitkan semangat untuk melahirkan karya-karya yang mendidik. Tidak dapat dipungkiri bahwa selama penyusunan tidak terlepas dari partisipasi beberapa pihak terkait yang telah mendukung penulis secara penuh. Maka dari itu, penulis merasa wajib menyampaikan rasa terima kasih yang tak terhingga kepada mereka secara khusus sebagai berikut:

1. Allah SWT. atas kehendak dan karunia-Nya yang memberikan Penulis kesehatan, kelancaran serta kemudahan dalam menyelesaikan tugas akhir.
2. Kedua orangtua Penulis, Ayahanda Munawir dan Ibunda Suriani yang dalam kesederhanaan berhasil menjadi orangtua yang selalu mendidik, memotivasi, dan penuh cinta kasih. Terimakasih atas segala kepercayaan, doa serta restu yang diberikan sehingga memudahkan Penulis dalam menghadapi setiap tahap kehidupan.
3. Saudara dan kerabat yang telah memberikan dukungan sehingga Penulis dapat menyelesaikan skripsi ini.
4. Bapak Prof. Muhammad Amri, SE., MA., Ph.D. dan bapak Dr. Amanus Khalifah Fil'ardy Yunus, SE., M.Si selaku dosen pembimbing utama dan

pendamping Penulis. Terimakasih untuk setiap ilmu, kemudahan, serta kesabaran yang diberikan sehingga skripsi ini dapat diselesaikan dengan baik dan benar.

5. Bapak Prof. Dr. Abd. Hamid Paddu, MA., CRP. Dan Ibu Dr. Indraswati T. A. Reviane, SE., MA., CWM®. selaku dosen penguji yang telah memberikan banyak saran, arahan, komentar, serta kritikan yang membangun untuk Penulis pada ujian seminar proposal dan ujian skripsi.
6. Seluruh dosen departemen Ilmu Ekonomi yang telah memberikan pengetahuan, arahan, bimbingan, dan nasehat kepada Penulis selama menuntut ilmu di Universitas Hasanuddin. Semoga Allah SWT membalas kebaikan kalian dengan berlipat-lipat ganda.
7. Teman-teman GRIFFINS Ilmu Ekonomi angkatan 2019 yang telah berjuang bersama-sama dalam proses perkuliahan. Terima kasih telah kebersamaan penulis bisa berproses sebagai mahasiswa Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Hasanuddin.
8. Teman-teman dan keluarga besar HIMAJIE, terkhusus Departemen Pengembangan Minat dan Bakat (Ipul, Arif, Alif, Tasha, Yusli) atas kerja sama dan momen berharga selama berproses dalam satu periode kepengurusan.
9. Teman-teman dan keluarga besar KOPMA Unhas terkhusus Bidang Litbang dan PA. Terima kasih telah menjadi wadah Penulis dalam berproses mengembangkan diri dan menjadi wadah dalam memupuk persaudaraan dan kekeluargaan.
10. Teman-teman KKNT 108 Pangkep, Posko Pundata Baji (Dinda, Artia, Jordy, Tina, Lia, Yana, Ipe, Kak Joshua) atas kerja sama dan pengalaman selama proses KKN yang menjadi salah satu momen berkesan dalam perkuliahan.
11. Kepada sahabat seperjuangan dari awal masuk perguruan tinggi sampai sekarang, Fadhilah Isnaeni. Terima kasih selalu mendukung dan memberikan bantuan kepada Penulis selama perkuliahan hingga penyusunan skripsi.
12. Semua pihak yang ikut membantu baik secara langsung maupun tidak langsung dalam penyusunan skripsi ini.

Makassar, 17 Agustus 2023

Miftahul Jannah

## **ABSTRAK**

### **ANALISIS PENGARUH KEBIJAKAN FISKAL, KEBIJAKAN MONETER, DAN PENANAMAN MODAL ASING TERHADAP OUTPUT GAP DI PROVINSI SULAWESI SELATAN**

Miftahul Jannah

Muhammad Amri

Amanus Khalifah Fil'ardy Yunus

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui pengaruh kebijakan moneter, kebijakan fiskal, dan penanaman modal asing terhadap output gap di Provinsi Sulawesi Selatan. Adapun variabel independen dalam penelitian ini adalah pengeluaran pemerintah, kredit umum, pembiayaan syariah, dan penanaman modal asing. Sementara variabel dependennya adalah output gap Sulawesi Selatan. Data yang digunakan yaitu data time series periode 2009-2019 di Sulawesi Selatan dan dianalisis menggunakan analisis regresi linear berganda. Hasil penelitian menunjukkan bahwa pengeluaran pemerintah, pembiayaan syariah, dan penanaman modal asing berpengaruh positif tidak signifikan terhadap output gap di Sulawesi Selatan. Sementara kredit umum berpengaruh negatif signifikan terhadap output gap di Sulawesi Selatan. Pengeluaran pemerintah tidak berpengaruh karena karakteristiknya lebih menekankan penggunaan anggaran untuk sektor riil akan meningkatkan produktivitas dan daya saing sehingga output aktual dan output potensial meningkat dan tidak mempengaruhi output gap. Pembiayaan syariah tidak berpengaruh karena prinsip syariah dapat membatasi akses keuangan bagi beberapa sektor ekonomi yang pada akhirnya tidak menimbulkan dampak pada output aktual. Penanaman modal asing tidak berpengaruh karena dapat meningkatkan efisiensi produksi, produktivitas tenaga kerja, sehingga output aktual meningkat diikuti peningkatan output potensial sehingga tidak mempengaruhi output gap. Terakhir, kredit umum berpengaruh negatif karena kredit yang disalurkan dengan mengontrol tingkat inflasi akan meningkatkan output aktual dan memperkecil output gap di Sulawesi Selatan.

**Kata Kunci:** Output Gap, Pengeluaran Pemerintah, Kredit Umum, Pembiayaan Syariah, Penanaman Modal Asing.



## **ABSTRACT**

### **ANALYSIS OF THE EFFECT OF FISCAL POLICY, MONETARY POLICY, AND FOREIGN INVESTMENT ON THE OUTPUT GAP IN THE PROVINCE OF SOUTH SULAWESI**

Miftahul Jannah

Muhammad Amri

Amanus Khalifah Fil'ardy Yunus

*This study aims to determine the effect of monetary policy, fiscal policy, and foreign investment on the output gap in South Sulawesi Province. The independent variables in this study are government spending, general credit, Islamic finance, and foreign investment. While the dependent variable is the South Sulawesi output gap. The data used is time series data for the 2009-2019 period in South Sulawesi and analyzed using multiple linear regression analysis. The results of the study show that government spending, Islamic financing, and foreign investment have no significant positive effect on the output gap in South Sulawesi. Meanwhile general credit has a significant negative effect on the output gap in South Sulawesi. Government spending has no effect because its characteristics emphasize the use of the budget for the real sector will increase productivity and competitiveness so that actual output and potential output increase and do not affect the output gap. Sharia financing has no effect because sharia principles can limit access to finance for several economic sectors which in the end will not have an impact on actual output. Foreign investment has no effect because it can increase production efficiency, labor productivity, so that actual output increases followed by an increase in potential output so it does not affect the output gap. Finally, general credit has a negative effect because credit extended by controlling the inflation rate will increase actual output and reduce the output gap in South Sulawesi.*

*Keywords: Output Gap, Government Expenditure, General Credit, Sharia Financing, Foreign Investment.*

## DAFTAR ISI

<b>HALAMAN JUDUL</b> .....	<b>i</b>
<b>PERSETUJUAN PEMBIMBING</b> .....	Error! Bookmark not defined.
<b>HALAMAN PENGESAHAN</b> .....	<b>iii</b>
<b>SURAT PERNYATAAN KEASLIAN</b> .....	<b>iv</b>
<b>PRAKATA</b> .....	<b>v</b>
<b>ABSTRAK</b> .....	<b>vii</b>
<b>ABSTRACT</b> .....	<b>viii</b>
<b>DAFTAR ISI</b> .....	<b>ix</b>
<b>DAFTAR GAMBAR</b> .....	<b>xi</b>
<b>DAFTAR TABEL</b> .....	<b>xii</b>
<b>BAB I PENDAHULUAN</b> .....	<b>1</b>
1.1 Latar Belakang .....	1
1.2 Rumusan Masalah .....	10
1.3 Tujuan Penelitian.....	10
1.4 Manfaat Penelitian.....	10
<b>BAB II TINJAUAN PUSTAKA</b> .....	<b>12</b>
2.1 Tinjauan Teoritis .....	12
2.1.1 Output Gap.....	12
2.1.2 Pengeluaran Pemerintah.....	17
2.1.3 Kredit Umum .....	20
2.1.4 Pembiayaan Syariah .....	23
2.1.5 Penanaman Modal Asing .....	25
2.2 Hubungan antar Variabel .....	28
2.2.1 Hubungan Pengeluaran Pemerintah dan Output.....	28
2.2.2 Hubungan Kredit Umum dan Output.....	30
2.2.3 Hubungan Pembiayaan Syariah dan Output .....	31
2.2.4 Hubungan Penanaman Modal Asing dan Output.....	33
2.3 Tinjauan Empiris.....	35
2.4 Kerangka Konseptual.....	36
2.5 Hipotesis Penelitian .....	38
<b>BAB III METODOLOGI PENELITIAN</b> .....	<b>40</b>
3.1 Ruang Lingkup Penelitian .....	40
3.2 Jenis dan Sumber Data.....	40
3.3 Metode Pengumpulan Data .....	41
3.4 Metode Analisis Data .....	41

3.5	Definisi Operasional Variabel.....	43
<b>BAB IV HASIL DAN PEMBAHASAN .....</b>		<b>46</b>
4.1	Perkembangan Variabel Penelitian.....	46
4.1.1	Perkembangan Variabel dalam mengukur Output Potensial di Sulawesi Selatan .....	46
4.1.2	Perkembangan Output Gap .....	50
4.1.3	Perkembangan Pengeluaran Pemerintah Sulawesi Selatan.....	53
4.1.4	Perkembangan Kredit Umum Sulawesi Selatan .....	54
4.1.5	Perkembangan Pembiayaan Syariah Sulawesi Selatan .....	55
4.1.6	Perkembangan Penanaman Modal Asing Sulawesi Selatan .....	56
4.2	Hasil Estimasi Variabel-Variabel Penelitian.....	58
4.2.1	Uji-t .....	59
4.2.2	Uji Koefisien Determinasi (R-squared) .....	60
4.2.3	Uji Simultan (Uji F).....	61
4.3	Interpretasi Penelitian.....	61
4.3.1	Analisis hasil estimasi Pengaruh Pengeluaran Pemerintah terhadap Output Gap di Sulawesi Selatan.....	61
4.3.2	Analisis hasil estimasi Pengaruh Kredit Umum terhadap Output Gap di Sulawesi Selatan .....	64
4.3.3	Analisis hasil estimasi Pengaruh Pembiayaan Syariah terhadap Output Gap di Sulawesi Selatan.....	65
4.3.4	Analisis hasil estimasi Pengaruh Penanaman Modal Asing terhadap Output Gap di Sulawesi Selatan.....	67
<b>BAB V PENUTUP .....</b>		<b>70</b>
5.1	Kesimpulan .....	70
5.2	Saran .....	71
<b>DAFTAR PUSTAKA .....</b>		<b>73</b>
<b>LAMPIRAN .....</b>		<b>77</b>

## DAFTAR GAMBAR

Gambar 1.1 Estimasi Output Potensial (Blanchard, 2003; Zhang, 2001; dan Amanus, 2017) Provinsi Sulawesi Selatan .....	3
Gambar 2.1 Kerangka Konseptual Penelitian.....	38
Gambar 4.1 Output Aktual Sulawesi Selatan Tahun 2009-2019.....	47
Gambar 4.2 Tingkat Inflasi Sulawesi Selatan Tahun 2009-2019.....	48
Gambar 4.3 Output Gap di Provinsi Sulawesi Selatan Tahun 2009-2019.....	51
Gambar 4.4 Pengeluaran Pemerintah Sulawesi Selatan Tahun 2009-2019.....	53
Gambar 4.5 Kredit Umum Sulawesi Selatan Tahun 2009-2019.....	55
Gambar 4.6 Pembiayaan Syariah Sulawesi Selatan Tahun 2009-2019.....	56
Gambar 4.7 Penanaman Modal Asing Sulawesi Selatan Tahun 2009-2019.....	57
<i>Gambar 4.8 Kerangka Konseptual Hasil Penelitian.....</i>	<i>59</i>

## DAFTAR TABEL

Tabel 4.1 Estimasi Output Potensial Sulawesi Selatan periode Disinflasi (Tahun 2009-2019).....	49
Tabel 4.2 Hasil Estimasi variabel Independen (X) terhadap variabel Dependen...	58

# **BAB I**

## **PENDAHULUAN**

### **1.1 Latar Belakang**

Pertumbuhan ekonomi merupakan salah satu indikator untuk mengukur keberhasilan pembangunan dalam suatu negara atau daerah. Pertumbuhan ekonomi merupakan tingkat pertambahan dari pendapatan nasional, sehingga pertumbuhan ekonomi dapat diartikan sebagai suatu proses kenaikan output per kapita dalam jangka panjang dan merupakan sebuah tolak ukur keberhasilan pembangunan ekonomi (Boediono, 1999). Pertambahan ini disebabkan oleh pertambahan jumlah dan kualitas yang selalu terjadi di dalam faktor-faktor produksi. Dalam jangka panjang, pertumbuhan ekonomi ditentukan oleh faktor kuantitas dan kualitas tenaga kerja, modal dan teknologi (Todaro dan Smith, 2006). Semakin tinggi tingkat pertumbuhan ekonomi maka semakin cepat proses pertambahan output suatu wilayah sehingga prospek perkembangan wilayah semakin baik.

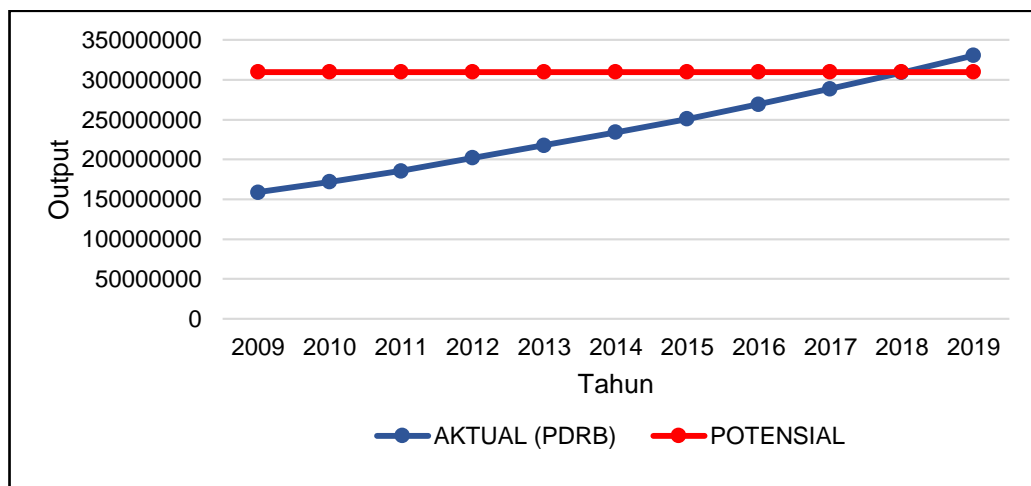
Output agregat atau biasa disebut output merupakan total nilai barang dan jasa yang diproduksi dalam perekonomian suatu negara selama periode tertentu. Perhitungan output tersebut menggunakan Produk Domestik Bruto (PDB) sebagai ukurannya di tingkat nasional (Adisasmita, 2013), sehingga Produk Domestik Regional Bruto (PDRB) dapat digunakan sebagai ukuran di tingkat daerah. Secara umum, output terbagi menjadi dua macam yaitu output aktual dan output potensial. Output aktual adalah nilai output yang terealisasi dalam perekonomian yang di-proxy dengan nilai PDB (Nurwanda dan Rifai, 2018). Ini mencerminkan kinerja riil perekonomian pada saat itu, yang dipengaruhi oleh berbagai faktor seperti investasi, konsumsi, perdagangan internasional, dan kebijakan pemerintah.

Sementara itu, output potensial adalah output berkelanjutan maksimum yang dapat diproduksi tanpa memicu peningkatan tekanan inflasi (Samuelson, 2010). Ini mencerminkan kapasitas ekonomi yang tersedia, termasuk faktor-faktor seperti tingkat pertumbuhan tenaga kerja, produktivitas, investasi dalam modal fisik dan manusia, dan inovasi teknologi.

Untuk menilai kinerja ekonomi, para ekonom sering memperkirakan output potensial atau pertumbuhan potensial (*potential growth*). Adanya perbedaan antara output potensial dan output aktual menghasilkan kesenjangan output (*output gap*) yang merupakan indikator utama tekanan inflasi. Output gap secara sederhana dapat menggambarkan adanya kelebihan penawaran maupun kelebihan permintaan di dalam suatu perekonomian. Sementara itu, kesenjangan pertumbuhan (*growth gap*) mengacu pada perbedaan antara tingkat pertumbuhan aktual dengan tingkat pertumbuhan potensial dalam perekonomian. Hal ini merujuk pada perbedaan antara tingkat aktual dan tingkat potensial baik dalam produksi (*output*) maupun pertumbuhan ekonomi. Pada dasarnya keduanya berusaha untuk memahami dan mengukur ketidakseimbangan atau perbedaan antara kinerja aktual dan potensial dalam perekonomian.

Estimasi output potensial dapat digunakan sebagai acuan untuk mengukur kinerja aktual suatu perekonomian. Dengan membandingkan tingkat pertumbuhan aktual dengan tingkat pertumbuhan potensial, kita dapat menilai sejauh mana perekonomian sedang memanfaatkan kapasitas dan potensi pertumbuhannya. Sementara itu, estimasi output gap dapat mengungkapkan ketimpangan atau ketidakseimbangan dalam perekonomian. Gap positif dimana output potensial lebih besar daripada output aktual yang menunjukkan penggunaan kapasitas produksi yang tidak optimal atau pertumbuhan ekonomi yang tidak optimum. Dalam hal ini, pemerintah dapat mengambil langkah-langkah untuk mendorong

pertumbuhan ekonomi, seperti kebijakan fiskal atau moneter yang merangsang investasi dan konsumsi. Sebaliknya dalam jangka pendek, dapat terjadi kondisi gap negatif dimana output aktual lebih besar daripada output potensial yang menunjukkan pertumbuhan ekonomi melampaui optimumnya. Dalam kondisi ini, pemerintah dapat menerapkan kebijakan kontraktif untuk memperlambat pertumbuhan ekonomi.



Sumber: Badan Pusat Statistik, data diolah

Gambar 1.1 Estimasi Output Potensial dan Output Gap (Blanchard, 2003; Zhang, 2001; dan Amanus, 2017) Provinsi Sulawesi Selatan

Gambar 1.1 menunjukkan hasil estimasi output potensial dan data output aktual (laju pertumbuhan PDRB). Estimasi dilakukan dalam periode disinflasi Provinsi Sulawesi Selatan dimana inflasi yang tinggi terjadi pada tahun 2008 yaitu sebesar 12,4 persen dan juga merupakan catatan inflasi tertinggi pada kurun waktu 2008-2021, kemudian ditanggapi pengambil kebijakan untuk menekan inflasi. Masa disinflasi pun dimulai pada tahun berikutnya (2009) di mana inflasi kemudian mengalami fluktuasi hingga akhir periode (2019, periode normal sebelum pandemi Covid-19) dengan tren menurun. Hubungan antara output gap



dan output aktual menunjukkan perubahan dalam tingkat produksi output aktual dan output gap seiring waktu.

Gambar 1.1 menunjukkan tingkat output aktual bergerak searah semakin mendekati output potensial. Hal ini berarti perekonomian sedang merespon dengan baik terhadap output potensial. Dalam grafik, output gap direpresentasikan sebagai jarak antara kurva output aktual dan output potensial yang memberikan gambaran tentang sejauh mana perekonomian sedang memanfaatkan kapasitas dan potensinya. Output gap positif akan menghasilkan jarak yang lebih besar di bawah output potensial, sementara output gap negatif akan menghasilkan jarak yang lebih besar di atas output potensial. Semakin kecil output gap mengindikasikan perekonomian bekerja dengan optimal sesuai potensinya. Adapun kondisi perekonomian yang diharapkan adalah perekonomian yang bekerja optimal dan diiringi dengan tingkat inflasi yang stabil untuk menghasilkan pertumbuhan ekonomi yang berkualitas.

Adanya kesenjangan output yang dapat terjadi dalam perekonomian menyebabkan penting untuk mengetahui seberapa besar kapasitas produksi maksimum yang perlu dicapai dalam hal ini potensial output agar pertumbuhan ekonomi dapat meningkat secara berkelanjutan dan berkualitas tanpa memicu terjadinya inflasi maupun deflasi. Pertumbuhan ekonomi dapat dipengaruhi oleh berbagai instrumen kebijakan fiskal dan moneter, serta berbagai variabel lain yang berpengaruh.

Kondisi perekonomian secara keseluruhan di setiap daerah dapat dilihat dari seberapa besar jumlah belanja pemerintah daerah pada wilayah bersangkutan. Pengeluaran pemerintah (*government expenditure*) merupakan salah satu instrumen kebijakan fiskal negara (Sukirno, 2004) yakni suatu tindakan pemerintah untuk mengatur jalannya perekonomian dengan cara menentukan

besarnya penerimaan dan pengeluaran pemerintah tiap tahunnya yang tercermin dalam dokumen Anggaran Pendapatan Belanja Negara (APBN) untuk nasional dan APBD untuk daerah/regional. Menurut teori Keynes, dengan perluasan belanja/pengeluaran pemerintah dapat mempercepat pertumbuhan ekonomi karena mendukung peningkatan output agregat.

Berdasarkan data Badan Pusat Statistik (BPS), realisasi pengeluaran pemerintah Provinsi Sulawesi Selatan secara umum terus mengalami peningkatan dalam kurun waktu 2009-2019 meningkat sekitar 20 triliun rupiah. Pengeluaran pemerintah merupakan indikator besarnya kegiatan pemerintah, apabila semakin banyak kegiatan pemerintah maka semakin besar pula pengeluaran pemerintah yang bersangkutan. Namun, ini bukanlah berarti bahwa pengeluaran pemerintah harus selalu ditingkatkan tanpa memperhitungkan aspek efisiensinya. Pengeluaran pemerintah berhubungan erat dengan pertumbuhan ekonomi karena digunakan dalam belanja pembangunan. Pada akhirnya pengeluaran ini akan menghasilkan produk-produk yang sangat diperlukan untuk meningkatkan pertumbuhan ekonomi dengan adanya kenaikan output secara agregat. Oleh karena itu, pengalokasian pengeluaran pemerintah terhadap pertumbuhan ekonomi juga akan mempengaruhi besar kecilnya output suatu wilayah.

Selain kebijakan fiskal, terdapat kebijakan moneter melalui sektor keuangan yang mempunyai peranan penting dalam mendorong pertumbuhan ekonomi suatu negara. Untuk mencapai pertumbuhan ekonomi sangat dibutuhkan sumber pendanaan untuk mendorong dunia usaha. Kebutuhan dana yang tidak sedikit sebagai modal pembangunan ini sangat ditentukan oleh perbankan. Kegiatan perbankan mempunyai posisi yang penting dalam konteks perekonomian makro. Selain melaksanakan fungsi sebagai lembaga intermediasi, bank juga berfungsi sebagai media transmisi kebijakan moneter bank sentral. Penyaluran

kredit merupakan fokus utama kegiatan perbankan dalam menjalankan fungsinya. Oleh sebab itu, aspek perkreditan tidak dapat dilepaskan dari pertumbuhan ekonomi di Indonesia. Data penyaluran kredit umum Provinsi Sulawesi Selatan berdasarkan data Bank Indonesia menunjukkan tren meningkat dimana tahun 2009 sebesar 36,6 miliar meningkat 129,2 miliar pada tahun 2019. Salah satu peran kredit dalam mendukung pertumbuhan ekonomi adalah dengan mengalokasikan pemberian kredit menurut prioritas pembangunan ekonomi sehingga dapat memperluas pemerataan hasil pembangunan. Implikasi kredit perbankan terhadap pembangunan ekonomi setidaknya berpengaruh pada dua hal. Pertama, kredit perbankan mampu meningkatkan konsumsi dan daya beli masyarakat melalui kredit konsumsi yang digunakan untuk memenuhi kebutuhan pribadi. Kedua, kredit perbankan berperan dalam mendorong peningkatan pembiayaan investasi dan modal unit usaha sehingga kapasitas dan produktivitas perekonomian menjadi lebih besar. Dari kedua hal tersebut efek selanjutnya dari kredit umum perbankan adalah adanya peningkatan output nasional akibat dari meningkatnya konsumsi dan investasi masyarakat secara keseluruhan sehingga tercapainya pertumbuhan ekonomi.

Saat ini, hampir semua sektor bisnis khususnya di negara-negara berkembang sangat tergantung terhadap pembiayaan perbankan sebagai sumber modal pembiayaan. Perbankan syariah sebagai bagian dari sistem perbankan nasional menjadi salah satu solusi alternatif dalam menyiasati gejolak ekonomi global yang semakin sulit diprediksi. Fungsi utama perbankan syariah yaitu sebagai penyalur dana masyarakat ke berbagai sektor pembiayaan. Pembiayaan syariah merupakan pendanaan yang diberikan oleh pihak bank kepada pihak lain atau nasabah untuk membantu memenuhi kebutuhan nasabah dalam bentuk konsumtif atau investasi melalui akad yang disepakati oleh pihak yang

bersangkutan. Berdasarkan hal tersebut, dapat disimpulkan bahwa pembiayaan merupakan kegiatan pendanaan yang diberikan untuk membantu investasi yang telah direncanakan sebelumnya (Asfiah, 2015). Dalam publikasi Otoritas Jasa Keuangan (OJK), menunjukkan realisasi pembiayaan syariah Provinsi Sulawesi Selatan yang berfluktuasi dengan tren meningkat dimana pada tahun 2009 terdapat pembiayaan sebesar satu miliar hingga tahun 2019 sebesar tujuh miliar. Jika sektor keuangan terutama perbankan syariah mengalami pertumbuhan yang baik, maka akan semakin banyak sumber pembiayaan yang dapat dialokasikan ke sektor-sektor ekonomi produktif dan pada akhirnya akan menambah pembangunan modal sektor ekonomi untuk meningkatkan produktivitasnya dalam menunjang pertumbuhan ekonomi.

Dalam pelaksanaan pembiayaan, perbankan syariah harus memenuhi dua aspek yaitu aspek syar'i dan aspek ekonomi. Aspek syar'i berarti dalam setiap realisasi pembiayaan kepada nasabah, bank syariah harus tetap berpedoman pada syariat islam yang berdasarkan pada prinsip tauhid (antara lain tidak mengandung unsur riba dan transaksi yang haram). Selain itu, dalam kegiatan ekonomi berprinsip syariah, ada batas tingkat inflasi yang diizinkan agar tidak merugikan masyarakat dan sesuai dengan nilai-nilai ekonomi Islam. Sedangkan dalam aspek ekonomi, disamping mempertimbangkan hal-hal syariah, bank syariah tetap mempertimbangkan perolehan keuntungan baik bagi bank syariah maupun bagi nasabah bank syariah (Astuti, 2015)

Dalam upaya pembangunan ekonomi, keterbatasan pembiayaan merupakan salah satu permasalahan yang sering terjadi. Salah satu solusi yang dapat dilakukan untuk menyelesaikan permasalahan pembangunan ekonomi, salah satunya ialah dengan cara menarik para investor asing untuk berinvestasi atau menanamkan modalnya di Indonesia. Teori Harrod-Domar menekankan

pentingnya pembentukan investasi bagi pertumbuhan ekonomi. Semakin tinggi investasi maka akan semakin baik perekonomian, investasi tidak hanya memiliki pengaruh terhadap permintaan agregat tetapi juga terhadap penawaran agregat melalui pengaruhnya terhadap kapasitas produksi. Investasi yang bersifat penanaman modal langsung akan berdampak pada penyerapan tenaga kerja, sehingga pada akhirnya dapat meningkatkan output nasional (Syafriada, 2014).

Investasi yang terjadi di suatu negara, yang terdiri dari investasi pemerintah dan investasi swasta. Investasi pemerintah dapat dijalankan melalui salah satu instrumen kebijakan, yaitu pengeluaran pemerintah untuk investasi sedangkan investasi dari sektor swasta dapat berasal dari dalam negeri maupun luar negeri (asing). Investasi yang berasal dari luar negeri berupa investasi asing langsung atau *foreign direct investment* (FDI) dan portofolio investasi asing. Pengaruh investasi asing memiliki arti penting terhadap pertumbuhan ekonomi di Indonesia. Penanaman Modal Asing (PMA) dipandang lebih efektif untuk mendorong pertumbuhan perekonomian.

Provinsi Sulawesi Selatan sebagai salah satu provinsi dengan berbagai kekayaan alamnya tentu memiliki potensi yang strategis dalam bidang investasi. Potensi tersebut mempunyai kemungkinan yang besar untuk aktivitas penanaman modal khususnya PMA karena banyaknya bahan mentah dari berbagai sektor pertanian, perkebunan, pertambangan dan penggalian dari hasil bumi, kehutanan dan juga potensi daerah yang dapat dijadikan objek wisata. Data Badan Koordinasi Penanaman Modal (BKPM) menunjukkan realisasi PMA Provinsi Sulawesi Selatan tahun 2009-2019 rata-rata 4.66 triliun. Angka ini dapat terus bertambah apabila potensi daerah ini dapat diberdayakan sehingga akan sangat besar manfaatnya untuk menambah devisa negara dan terciptanya kegiatan ekonomi di sekitar daerah tersebut sehingga dapat meningkatkan pendapatan masyarakat setempat.

Dalam upaya pembangunan ekonomi, modal memegang peranan penting, karena akumulasi modal akan menentukan cepat atau lambatnya pertumbuhan ekonomi dan mencerminkan marak lesunya pembangunan ekonomi suatu daerah. Dimana investasi itu dapat dilakukan dengan cara menghimpun akumulasi modal untuk membangun sejumlah gedung dan peralatan yang berguna bagi kegiatan produktif, maka output potensial suatu bangsa akan bertambah dan pertumbuhan ekonomi jangka panjang juga akan meningkat.

Estimasi output potensial dan output gap dapat digunakan untuk mengevaluasi efektivitas kebijakan ekonomi yang telah diterapkan. Dengan membandingkan output aktual dengan tingkat output potensial sebelum dan setelah implementasi kebijakan, kita dapat menilai apakah kebijakan tersebut telah berhasil dalam mendorong pertumbuhan ekonomi atau memperbaiki ketidakseimbangan yang ada. Dengan memahami estimasi output potensial dan output gap, para pengambil kebijakan dapat menginformasikan keputusan mereka dengan lebih baik dan mengambil langkah-langkah yang sesuai untuk mencapai pertumbuhan ekonomi yang berkelanjutan dan stabilitas makroekonomi.

Berdasarkan penjelasan di atas, dapat diketahui bahwa pertumbuhan ekonomi didukung oleh berbagai instrumen kebijakan fiskal dan moneter melalui kebijakan pengelolaan pengeluaran pemerintah, kredit umum, dan pembiayaan syariah. Selain itu, faktor lain seperti ketersediaan penanaman modal asing juga mendukung peningkatan pertumbuhan ekonomi, output potensial, maupun output gap di Provinsi Sulawesi Selatan. Penelitian mengenai output gap dan faktor yang mempengaruhinya perlu diteliti agar dapat mengetahui seberapa besar kapasitas produksi maksimum yang perlu dicapai dalam hal ini potensial output agar menghasilkan peningkatan output yang berkualitas dan berkelanjutan tanpa memicu terjadinya inflasi maupun deflasi.

## **1.2 Rumusan Masalah**

Berdasarkan latar belakang di atas, maka rumusan masalah pada penelitian ini antara lain:

1. Apakah pengeluaran pemerintah berpengaruh terhadap output gap di Provinsi Sulawesi Selatan?
2. Apakah kredit umum berpengaruh terhadap output gap di Provinsi Sulawesi Selatan?
3. Apakah pembiayaan syariah berpengaruh terhadap output gap di Provinsi Sulawesi Selatan?
4. Apakah penanaman modal asing berpengaruh terhadap output gap di Provinsi Sulawesi Selatan?

## **1.3 Tujuan Penelitian**

Berdasarkan rumusan masalah di atas, maka tujuan dari penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Untuk mengetahui pengaruh pengeluaran pemerintah terhadap output gap di Provinsi Sulawesi Selatan
2. Untuk mengetahui pengaruh kredit umum terhadap output gap di Provinsi Sulawesi Selatan.
3. Untuk mengetahui pengaruh pembiayaan syariah terhadap output gap di Provinsi Sulawesi Selatan.
4. Untuk mengetahui pengaruh penanaman modal asing terhadap output gap di Provinsi Sulawesi Selatan

## **1.4 Manfaat Penelitian**

Hasil dari penelitian ini diharapkan dapat memberikan manfaat, antara lain:

1. Menambah, melengkapi, dan sebagai perbandingan bagi hasil-hasil penelitian yang sudah ada menyangkut topik yang sama.
2. Diharapkan dapat menjadi referensi dan acuan pemerintah dalam mengambil kebijakan terkait dengan topik penelitian.
3. Sebagai referensi pendekatan untuk mengestimasi output gap berdasarkan teori permintaan agregat.
4. Diharapkan dapat bermanfaat sebagai referensi bagi pembaca dan peneliti yang ingin memperdalam pengetahuan tentang pengaruh kebijakan fiskal dan kebijakan moneter serta penanaman modal asing (PMA) terhadap output gap



## **BAB II**

### **TINJAUAN PUSTAKA**

#### **2.1 Tinjauan Teoritis**

##### **2.1.1 Output Gap**

Menurut Boediono (1999), Pertumbuhan ekonomi merupakan tingkat penambahan dari pendapatan nasional, sehingga pertumbuhan ekonomi dapat diartikan sebagai suatu proses kenaikan output per kapita dalam jangka panjang dan merupakan sebuah tolak ukur keberhasilan pembangunan ekonomi. Pertumbuhan ekonomi akan terjadi apabila terdapat kecenderungan kenaikan output secara terus menerus dalam jangka panjang. Pertambahan ini disebabkan oleh pertambahan jumlah dan kualitas yang selalu terjadi di dalam faktor-faktor produksi. Teori pertumbuhan ekonomi neoklasik oleh Solow menyatakan bahwa pertumbuhan output ditentukan oleh faktor kenaikan kuantitas dan kualitas tenaga kerja, penambahan modal, dan penyempurnaan teknologi (Todaro dan Smith, 2006). Sederhananya, meningkatkan kuantitas atau kualitas penduduk usia kerja, alat-alat dan cara yang dimiliki untuk menggabungkan tenaga kerja, modal, dan bahan mentah, akan meningkatkan output ekonomi. Semakin tinggi tingkat pertumbuhan ekonomi maka semakin cepat proses penambahan output suatu wilayah sehingga prospek perkembangan wilayah semakin baik. Sementara itu, dalam teori Keynesian yang dicetuskan oleh J.M. Keynes (1883-1946), menyatakan bahwa dalam jangka pendek output nasional dan kesempatan kerja terutama ditentukan oleh permintaan aggregate. Kaum Keynesian yakin bahwa kebijakan moneter ataupun kebijakan fiskal harus digunakan untuk mengatasi pengangguran dan menurunkan laju inflasi. Konsep-konsep Keynesian

menunjukkan bahwa peranan pemerintah sangat besar dalam menciptakan pertumbuhan ekonomi.

Output merupakan total nilai barang dan jasa yang diproduksi dalam perekonomian suatu negara selama periode tertentu. Perhitungan output tersebut menggunakan Produk Domestik Bruto (PDB) sebagai ukurannya di tingkat nasional (Adisasmita, 2013). Dalam ekonomi makro, output terbagi menjadi dua macam yaitu output aktual dan output potensial. Output aktual adalah nilai output perekonomian yang terealisasi dalam perekonomian yang di-proxy dengan nilai PDB. Sedangkan output potensial adalah tingkat produksi optimal dimana input tenaga kerja dan modal digunakan pada tingkat kapasitas jangka panjang yang berkelanjutan, dengan tingkat pengangguran natural dan inflasi yang stabil (Nurwanda dan Rifai, 2018).

Output potensial menurut Samuelson (2010) adalah output berkelanjutan maksimum yang dapat dicapai oleh suatu perekonomian dengan memanfaatkan sumber daya dengan maksimum tanpa memicu tekanan peningkatan inflasi. Hal ini berarti semua sumber daya digunakan sepenuhnya. Output potensial ditentukan oleh kapasitas produktif ekonomi yang bergantung pada input yang tersedia (modal, tenaga kerja, tanah, dll.) dan efisiensi teknologi ekonomi. De Masi (1997) menyatakan bahwa output potensial merepresentasikan *output* maksimal yang dapat dihasilkan dalam suatu perekonomian tanpa menyebabkan tekanan inflasi. Sementara itu, Andersson et al. (2018) mendefinisikan output potensial sebagai tingkat output tertinggi yang dapat dipertahankan suatu perekonomian dalam jangka menengah tanpa menimbulkan inflasi berlebih.

Selisih antara output potensial dan output aktual menghasilkan kesenjangan output (*gap output*). Output gap secara sederhana dapat menggambarkan adanya kelebihan penawaran (*excess supply*) maupun kelebihan

permintaan (*excess demand*) di dalam suatu perekonomian (Nasution dan Hendranata, 2014). Adapun kesenjangan pertumbuhan (*growth gap*) mengacu pada perbedaan antara tingkat pertumbuhan aktual dengan tingkat pertumbuhan potensial dalam perekonomian. Hal ini merujuk pada perbedaan antara tingkat aktual dan tingkat potensial baik dalam produksi (*output*) maupun pertumbuhan ekonomi. Pada dasarnya keduanya berusaha untuk memahami dan mengukur ketidakseimbangan atau perbedaan antara kinerja aktual dan potensial dalam perekonomian. Menurut *Reserve Bank of New Zealand* (Claus, et al., 2000) dari perspektif bank sentral, *output gap* merupakan ringkasan indikator dari permintaan relatif dan komponen penawaran kegiatan ekonomi. Dengan demikian, *output gap* memberikan ukuran tingkat tekanan inflasi dalam perekonomian dan merupakan penghubung penting antara sisi riil ekonomi, produksi barang dan jasa, serta inflasi. Selain itu, *output gap* memungkinkan kita untuk mengukur berapa besar penyimpangan siklus *output* dari *output* potensial yang kemudian bisa dijadikan indikator kualitas pertumbuhan ekonomi suatu negara.

*Output* potensial dan *output gap* merupakan input penting dalam kerangka kebijakan ekonomi makro. *Output* potensial digunakan sebagai ukuran produksi atau kapasitas suatu perekonomian pada sisi penawaran yang dinilai berdasarkan stok modal, penggunaan tenaga kerja, dan teknologi yang tersedia. Dalam jangka panjang, *output* potensial ditentukan oleh utilisasi faktor-faktor produksi yang tersedia secara efisien untuk tingkat produktivitas tertentu. Namun dalam jangka pendek, permintaan agregat bisa mendorong tingkat produksi melebihi *output* potensial jangka panjang. Kondisi ini menimbulkan tekanan dalam bentuk kelebihan permintaan di pasar barang dan tenaga kerja yang pada akhirnya menyebabkan kenaikan inflasi.

Perhitungan output gap dapat menentukan kondisi perekonomian sebagai dasar dalam menentukan kebijakan baik fiskal maupun moneter. Apabila output aktual lebih tinggi dari output potensial yaitu output gap negatif, mengindikasikan perekonomian dalam kondisi *boom*/ekspansi atau pertumbuhan ekonomi melampaui optimumnya (Nurwanda dan Rifai, 2018). Output gap negatif biasanya ditandai dengan permintaan yang berlebih (*excess demand*) sehingga tingkat harga-harga cenderung naik dan mendorong adanya inflasi yang tinggi. Pertumbuhan ekonomi yang melampaui optimumnya juga menyebabkan meningkatnya permintaan terhadap barang-barang impor, sehingga neraca perdagangan menjadi defisit atau neraca transaksi berjalan mengalami defisit yang pada gilirannya dapat memicu sentimen negatif terhadap perekonomian secara keseluruhan, terutama terhadap nilai tukar rupiah. Kondisi perekonomian dengan output gap yang negatif ini biasanya disebut *overheating*. Hal ini membutuhkan respon kebijakan fiskal kontraktif, seperti mengurangi belanja pemerintah, meningkatkan pajak, menaikkan harga BBM bersubsidi, serta beberapa kebijakan lainnya yang dapat memperlambat pertumbuhan ekonomi. Pada saat yang sama, otoritas moneter juga dapat melakukan kebijakan moneter kontraktif, seperti meningkatkan suku bunga dan mengurangi jumlah uang beredar sehingga memperlambat pertumbuhan kredit yang akan memperlambat pertumbuhan ekonomi secara keseluruhan

Sebaliknya, output aktual yang lebih rendah dibandingkan dengan output potensial yaitu output gap positif mencerminkan penggunaan kapasitas produksi yang tidak optimal atau pertumbuhan ekonomi yang tidak optimum (Nasution dan Hendranata, 2014). Dalam kondisi seperti ini penawaran cenderung berlebih (*excess supply*) sehingga tingkat harga-harga cenderung menurun dan deflasi (perekonomian dalam masa resesi). Pertumbuhan ekonomi yang tidak maksimum

juga menyebabkan peningkatan angka pengangguran dan penurunan penerimaan pajak. Pada kondisi ini, dibutuhkan respon kebijakan baik fiskal maupun moneter yang ekspansif untuk dapat meningkatkan atau menciptakan permintaan. Kebijakan fiskal ekspansif diantaranya melalui penurunan pajak untuk mendorong konsumsi dan investasi yang pada gilirannya akan meningkatkan pertumbuhan ekonomi. Pemerintah juga dapat meningkatkan pengeluaran pemerintah maupun mendorong peningkatan ekspor dengan memberikan insentif kepada eksportir, khususnya eksportir manufaktur. Disamping itu pemerintah juga dapat merelaksasi kebijakan impor bahan baku dan penolong untuk meningkatkan pertumbuhan sektor industri, meningkatkan belanja pemerintah serta beberapa kebijakan fiskal lainnya. Dari sisi kebijakan moneter, bank sentral dapat melakukan kebijakan moneter ekspansif melalui penurunan suku bunga dan meningkatkan jumlah uang beredar sehingga penyaluran kredit meningkat, dan dengan demikian akan meningkatkan pertumbuhan ekonomi.

Menurut Samuelson (2010), output potensial merupakan hubungan yang saling terkait dan mempengaruhi antara inflasi dan output. Hubungan ini juga dapat digambarkan melalui *aggregate demand relations*. Kurva permintaan agregat menunjukkan hubungan antara output dan tingkat harga (Blanchard, 2003). Output yang tinggi biasanya mengarah pada tingginya permintaan dan harga yang meningkat, menyebabkan inflasi. Sementara inflasi yang tinggi dapat membatasi tingkat produksi dan output karena biaya produksi meningkat dan daya beli masyarakat berkurang. Oleh karena itu, kebijakan pemerintah dan bank sentral selalu untuk mengendalikan inflasi untuk memastikan stabilitas harga dan menjaga tingkat produksi dan output pada tingkat yang optimal. Konsep output gap dijelaskan menggunakan inflasi dan output, sementara itu hubungan antara inflasi dan pengangguran yang dapat dijelaskan dalam konsep *Nonaccelerating Inflation*

*Rate of Unemployment* (NAIRU) yaitu tingkat pengangguran yang konsisten dengan tingkat inflasi yang konstan (Samuelson, 2010). NAIRU dipakai sebagai dasar untuk memprediksi dan mengendalikan inflasi dengan cara mengatur tingkat pengangguran. Jika tingkat pengangguran lebih rendah dari NAIRU, perekonomian diprediksi akan memperlihatkan tingkat inflasi yang meningkat karena ketersediaan tenaga kerja yang terlalu rendah menyebabkan kenaikan harga. Sebaliknya, jika tingkat pengangguran lebih tinggi dari NAIRU, diprediksi akan terjadi penurunan tingkat inflasi.

Konsep mengenai output potensial adalah output maksimum yang dihasilkan suatu perekonomian tanpa meninggalkan tekanan inflasi. Hal ini terjadi karena sumber daya yang tersedia di produksi sebatas kapasitas yang dimiliki. Dalam jangka pendek, estimasi antara output aktual dengan output potensial memberikan informasi mengenai sumber-sumber tekanan inflasi. Sementara dalam jangka panjang, estimasi output potensial memberikan sinyal mengenai tingkat produksi yang diperlukan guna mencapai *sustainable economic growth* (Wicaksono dkk, 2001). Jadi, output potensial dapat digunakan sebagai ukuran produksi atau kapasitas suatu perekonomian serta sebagai salah satu alat yang dapat digunakan oleh pemerintah dalam mengambil suatu kebijakan.

### **2.1.2 Pengeluaran Pemerintah**

Dalam analisis ekonomi makro, pengeluaran pemerintah merupakan salah satu variabel yang berperan dalam menentukan Produk Domestik Bruto (PDB) Menurut Sukirno, (2013), pengeluaran pemerintah (*government expenditure*) merupakan bagian dari kebijakan fiskal yaitu suatu tindakan pemerintah untuk mengatur jalannya perekonomian melalui instrumen anggaran. Pengeluaran pemerintah dibutuhkan untuk menambah modal fisik seperti infrastruktur dasar dan fasilitas serta pelayanan umum. Sementara itu, menurut Rahmawati (2022),

pengeluaran pemerintah merupakan pengeluaran untuk membiayai berbagai program pendukung kegiatan pemerintahan yang ditujukan untuk pencapaian kesejahteraan masyarakat secara umum. Pengeluaran pemerintah tercermin dalam dokumen (Anggaran Pendapatan dan Belanja Nasional (APBN) untuk nasional dan APBD untuk daerah/regional. Menurut definisi, pengeluaran pemerintah diartikan sebagai penggunaan uang dan sumberdaya suatu negara untuk membiayai suatu kegiatan negara atau pemerintah dalam rangka mewujudkan fungsinya dalam melakukan kesejahteraan (Pujoalwanto, 2014).

Dasar teori pengeluaran pemerintah dapat dilihat dari persamaan keseimbangan pendapatan nasional yaitu  $Y = C + I + G + (X-M)$  yang merupakan sumber pandangan kaum Keynesian akan mengenai relevansi campur tangan pemerintah dalam perekonomian. Variabel Y menggambarkan pendapatan nasional sekaligus penawaran agregat, permintaan agregat digambarkan pada persamaan  $C+I+G+(X-M)$  dimana G merupakan pengeluaran pemerintah yang merupakan bentuk dari campur tangan pemerintah dalam perekonomian. Berdasarkan persamaan tersebut dapat diketahui bahwa setiap kenaikan atau penurunan pengeluaran pemerintah akan menaikkan atau menurunkan pendapatan nasional sekaligus berpengaruh terhadap output yang dihasilkan suatu negara.

Teori klasik yang membahas pertumbuhan ekonomi yang dipengaruhi oleh peran pemerintah adalah teori klasik Keynes. Dalam teori Keynes beranggapan bahwa perluasan belanja pemerintah dapat mempercepat pertumbuhan ekonomi, dimana pengeluaran pemerintah yang tinggi menyebabkan peningkatan permintaan agregat yang pada gilirannya meningkatkan output dan pertumbuhan ekonomi. Belanja pemerintah menjadi bagian penting dari perekonomian makro suatu negara, karena menentukan ke mana kondisi ekonomi negara akan dibawa.

Oleh karena itu, belanja pemerintah merupakan seperangkat produk yang dihasilkan yang memuat pilihan atau keputusan yang dibuat oleh pemerintah dengan tujuan utama adalah untuk menyediakan barang-barang publik dan pelayanan kepada masyarakat. Sementara itu, teori Wagner menekankan bahwa pengeluaran pemerintah dengan pertumbuhan output terlihat memiliki hubungan timbal-balik. Berdasarkan hal tersebut, jika pendapatan perkapita terjadi peningkatan, maka relatifnya terjadi pula peningkatan pada pengeluaran pemerintah, dan hal ini mengambil porsi yang lebih besar dalam PDB. Hal tersebut dikarenakan keharusan pemerintah dalam mengatur hubungan yang muncul di masyarakat, pendidikan, hukum, dan lain sebagainya.

Pengeluaran pemerintah Indonesia menurut Dumairy (1996) diklasifikasikan menjadi dua, yaitu: pertama pengeluaran rutin yaitu, pengeluaran yang dikeluarkan untuk pemeliharaan atau penyelenggaraan roda pemerintahan sehari-hari, kedua pengeluaran pembangunan yaitu, pengeluaran yang dikeluarkan yang bersifat untuk menambah modal masyarakat dalam bentuk pembangunan baik prasarana fisik dan non fisik yang nantinya akan menimbulkan kegiatan ekonomi masyarakat. Dibedakan atas pengeluaran pembangunan yang dibiayai dengan dana rupiah dan bantuan proyek. Pengeluaran pembangunan untuk membiayai program-program pembangunan dengan anggaran yang sudah disesuaikan yang sudah terealisasi. Dalam Permendagri No. 77 Tahun 2020 mengklasifikasikan pengeluaran pemerintah berdasarkan jenis belanja yaitu: belanja operasi, belanja modal, belanja tidak terduga, dan belanja transfer

Penelitian ilmiah sebelumnya telah banyak yang membahas pengaruh pengeluaran pemerintah terhadap pertumbuhan ekonomi. Dalam penelitian Jamili (2017) menyatakan bahwa pengeluaran/belanja pemerintah berpengaruh positif signifikan terhadap pertumbuhan ekonomi. Hal ini sejalan dengan penelitian yang



dilakukan oleh Panglipurningrum dan Nurdyastuti (2020) yang menjelaskan bahwa pengeluaran pemerintah mempunyai pengaruh positif dan signifikan terhadap PDRB. Hal ini menunjukkan bahwa apabila pengeluaran pemerintah ditingkatkan maka PDRB akan mengalami peningkatan yang signifikan. Hasil yang berbeda ditemukan dalam penelitian Pratikto (2019) mengenai pengaruh pengeluaran pemerintah di 17 sektor ekonomi terhadap pertumbuhan ekonomi, hanya enam sektor yang berpengaruh secara signifikan dimana dari keenam sektor tersebut, hanya satu yang berpengaruh positif. Apabila tidak diperhatikan signifikasinya, hampir keseluruhan pengeluaran pemerintah untuk pembangunan di sektor ekonomi memiliki pengaruh yang negatif terhadap pertumbuhan ekonomi.

### **2.1.3 Kredit Umum**

Menurut Kasmir (2012), kredit atau pembiayaan merupakan tagihan yang skalanya dapat dihitung menggunakan uang. Adapun menurut Hasibuan (2011), kredit merupakan semua jenis pinjaman yang harus dibayar kembali bersama dengan bunganya oleh peminjam sesuai dengan perjanjian yang telah disepakati. Sedangkan menurut Undang-undang Perbankan Nomor 10 Tahun 1998, kredit adalah penyediaan uang atau tagihan yang dapat dipersamakan dengan itu, berdasarkan persetujuan atau kesepakatan pinjam meminjam antara bank dengan pihak lain yang mewajibkan pihak peminjam untuk melunasi utangnya setelah jangka waktu tertentu dengan pemberian bunga.

Dari pengertian tersebut di atas dapat disimpulkan bahwa pinjaman atau kredit dapat dalam bentuk uang ataupun tagihan lainnya yang nilainya telah diuangkan kemudian adanya kesepakatan antara kedua belah pihak sesuai perjanjian yang telah dibuat sehingga muncul hak dan kewajiban masing-masing pihak termasuk jangka waktu dan bunga yang telah ditetapkan serta sanksi yang

diberikan ketika debitur ingkar janji dalam perjanjian yang telah dibuat (Fahriyansyah, 2018).

Kredit umum perbankan memiliki berbagai fungsi bagi masyarakat umum. Menurut Latumaerissa (2014), fungsi kredit perbankan ada enam yaitu: pertama, meningkatkan daya guna uang yang berdasarkan fungsi intermediasi perbankan yaitu perbankan menghimpun dana dari masyarakat yang memiliki dana berlebih dalam bentuk simpanan yang selanjutnya dana tersebut disalurkan kembali dalam bentuk pinjaman kepada pihak yang membutuhkan dana. Mekanisme dana ini akan menambah nilai atau daya guna uang karena dapat dimanfaatkan oleh pihak yang membutuhkan. Kedua, meningkatkan daya guna barang melalui pemberian kredit yang digunakan untuk kegiatan konsumsi barang modal untuk kegiatan usaha sehingga mendorong produktivitas ekonomi. Ketiga, sebagai alat stabilitas ekonomi yang dalam kaitannya dengan kebijakan pemerintah untuk mengatasi dan mengendalikan kondisi makroekonomi negara jika ada pada kondisi ekonomi panas. Pada kondisi ini biasanya diberlakukan kebijakan uang ketat guna pengendalian inflasi, meningkatkan ekspor serta pemenuhan kebutuhan pokok domestik melalui pemberian kredit selektif kepada sektor yang berorientasi pada ekspor dan produktif. Keempat, meningkatkan kegairahan usaha masyarakat yang berkaitan dengan peran serta bank sebagai lembaga keuangan yang bertugas untuk menunjang kegiatan usaha masyarakat yang kekurangan modal baik modal kerja maupun modal investasi baru dan investasi pengembangan. Kelima, meningkatkan pendapatan nasional dimana dengan kredit para pebisnis dapat melakukan aktivitas usaha yang baik dan berkesinambungan, selanjutnya tenaga kerja dibutuhkan sebagai penggerak usaha yang mereka lakukan. Dengan begitu, tenaga kerja akan mendapat balas jasa ekonomis dari kontribusi kegiatan produksi yang secara otomatis akan meningkatkan pendapatan pekerja, dan dengan

pendapatan tersebut akan meningkatkan kemampuan daya beli untuk melakukan konsumsi. Kondisi ini akan menciptakan pengaruh angka pengganda (*multiplier effect*) yang pada akhirnya terjadi peningkatan pendapatan nasional setiap tahun. Keenam, meningkatkan hubungan internasional ini berkaitan dengan tambahan devisa negara akibat aktivitas ekonomi perbankan masing-masing negara yang saling berhubungan. Pembukaan kantor-kantor bank di suatu negara akan membantu kegiatan ekonomi domestik dengan pemberian kredit. Selain itu *off shore loan* dari luar negeri juga dapat membantu pembangunan negara berkembang sehingga meningkatkan hubungan kedua negara.

Kegiatan perbankan mempunyai posisi yang penting dalam konteks perekonomian makro. Selain melaksanakan fungsi sebagai lembaga intermediasi, bank juga berfungsi sebagai media transmisi kebijakan moneter bank sentral. Penyaluran kredit merupakan fokus utama kegiatan perbankan dalam menjalankan fungsinya. Oleh sebab itu, aspek perkreditan tidak dapat dilepaskan dari pertumbuhan ekonomi di Indonesia. Salah satu peran kredit dalam mendukung pertumbuhan ekonomi adalah dengan mengalokasikan pemberian kredit menurut prioritas pembangunan ekonomi sehingga dapat memperluas pemerataan hasil pembangunan. Penelitian Agusman (2015) menunjukkan bahwa kredit perbankan memiliki pengaruh positif dan signifikan terhadap pertumbuhan ekonomi sehingga diperlukan usaha untuk meningkatkan efisiensi dan efektivitas lembaga keuangan ini agar dapat memicu pertumbuhan ekonomi yang lebih pesat. Sementara itu, hasil berbeda diperoleh dalam penelitian Fahriyansyah (2018) yang menunjukkan bahwa pertumbuhan kredit perbankan berpengaruh signifikan terhadap pertumbuhan ekonomi, akan tetapi memiliki hubungan yang negatif. Kondisi seperti ini disebabkan oleh tidak seimbangnya pertumbuhan kredit dengan

pertumbuhan output yang mampu dihasilkan dalam perekonomian sehingga seluruh dana kredit tidak tersalurkan secara penuh.

#### **2.1.4 Pembiayaan Syariah**

Dalam arti sempit, pembiayaan merupakan pendanaan yang dilakukan oleh lembaga pembiayaan seperti bank syariah kepada nasabah. Pembiayaan secara luas berarti *financing* atau pembelanjaan yaitu pendanaan yang dikeluarkan untuk mendukung investasi yang telah direncanakan, baik dilakukan sendiri maupun dikerjakan oleh orang lain (Muhammad, 2018). Pembiayaan atau *financing* adalah pendanaan yang diberikan oleh suatu pihak kepada pihak lain untuk mendukung investasi yang telah direncanakan, baik dilakukan sendiri maupun lembaga. Dalam UU Nomor 21 Tahun 2008 disebutkan bahwa pembiayaan berdasarkan prinsip syariah adalah penyediaan dana atau tagihan yang dipersamakan dengan itu berdasarkan persetujuan atau kesepakatan antara bank syariah atau Unit Usaha Syariah (UUS) dengan pihak lain yang mewajibkan pihak yang dibiayai untuk mengembalikan uang atau tagihan tersebut setelah jangka waktu tertentu dengan imbalan atau bagi hasil. Pembiayaan merupakan aktivitas bank syariah dalam menyalurkan dana kepada pihak lain berdasarkan prinsip syariah.

Dalam pelaksanaan pembiayaan, bank syariah harus memenuhi dua aspek yaitu Aspek Syar'i dan Aspek Ekonomi. Pertama, aspek Syar'i berarti dalam setiap realisasi pembiayaan kepada nasabah, bank syariah harus tetap berpedoman pada syariat Islam antara lain tidak mengandung unsur *maisyir* (transaksi yang digantungkan kepada suatu keadaan yang tidak pasti dan bersifat untung-untungan); *gharar* (transaksi yang objeknya tidak jelas, tidak dimiliki, tidak diketahui keberadaannya, atau tidak dapat diserahkan pada saat transaksi dilakukan kecuali diatur lain dalam syariah); dan riba serta bidang usahanya harus

halal. Selain itu, dalam kegiatan ekonomi berprinsip syariah, ada batas tingkat inflasi yang diizinkan agar tidak merugikan masyarakat dan sesuai dengan nilai-nilai ekonomi Islam. Sedangkan Aspek Ekonomi, di samping mempertimbangkan hal-hal syariah, bank syariah tetap mempertimbangkan perolehan keuntungan baik bagi bank syariah maupun bagi nasabah bank syariah (Astuti, 2015).

Islam merumuskan suatu sistem ekonomi yang sama sekali berbeda dari sistem-sistem lainnya. Hal ini karena ekonomi islam memiliki akar dari syariah yang menjadi sumber dan paduan bagi setiap muslim dalam melakukan aktivitasnya. Islam mempunyai tujuan-tujuan syariah serta petunjuk operasional (strategi) untuk mencapai tujuan tersebut. Tujuan-tujuan itu sendiri selain mengacu pada kepentingan manusia untuk mencapai kesejahteraan dan kehidupan yang lebih baik, juga memiliki nilai yang sangat penting bagi persaudaraan dan keadilan sosial ekonomi, serta menuntut tingkat kepuasan yang seimbang antara kepuasan materi dan ruhani. Selain itu, terdapat konsep berkah dalam islam untuk mencapai perekonomian yang berkualitas. Konsep berkah dalam islam melibatkan ide bahwa segala sesuatu yang dilakukan dengan patuh kepada ajaran agama dan prinsip-prinsip moral akan mendapatkan dukungan dan keberkahan dari Allah. Dalam operasionalnya bank syariah menggunakan tiga model akad pembiayaan yaitu pembiayaan dengan prinsip bagi hasil, pembiayaan dengan prinsip jual beli, dan pembiayaan dengan prinsip sewa-menyewa (Ulpah, 2020).

Pembiayaan syariah dalam sektor keuangan mempunyai kedudukan penting dalam mendorong pertumbuhan ekonomi. Hal ini dikarenakan fungsi perbankan yang bertindak sebagai manajer investasi dan investor dapat mendukung pengembangan sektor rill, baik dalam rangka meningkatkan iklim usaha maupun iklim investasi serta juga penciptaan lapangan kerja. Hal ini merupakan fenomena yang harus dicermati karena merupakan peluang yang

sangat prospektif mengingat bahwa penduduk Indonesia yang mayoritas muslim merupakan pasar yang cukup potensial bagi perkembangan perbankan syariah. Fungsi perbankan dalam menghimpun dan memobilisasi dana-dana masyarakat atau perusahaan kemudian disalurkan pada usaha-usaha produktif berpengaruh positif terhadap peningkatan pertumbuhan ekonomi nasional (Deti dkk, 2017). Penelitian oleh Prastowo (2018) yang melakukan studi empiris di 13 negara dan menyimpulkan bahwa variabel pembiayaan syariah memiliki pengaruh positif terhadap pertumbuhan ekonomi. Hasil penelitian yang dilakukan Hidayat (2020) menunjukkan hasil yang berbeda dimana pembiayaan perbankan syariah tidak berpengaruh terhadap variabel Produk Domestik Bruto (PDB).

#### **2.1.5 Penanaman Modal Asing**

Investasi diartikan sebagai pengeluaran atau perbelanjaan penanam-penanam modal atau perusahaan untuk membeli barang-barang modal dan perlengkapan-perengkapan produksi untuk menambah kemampuan memproduksi barang dan jasa yang tersedia dalam perekonomian, sehingga investasi disebut juga dengan penanaman modal (Sukirno, 2013). Oleh karena itu, penanaman modal asing dapat mendorong peningkatan output aktual dari sisi produksi.

Penanaman modal asing (PMA) merupakan aliran arus modal yang berasal dari luar negeri yang mengalir ke sektor swasta baik yang melalui investasi langsung (*direct investment*) maupun investasi tidak langsung berbentuk portofolio. Investasi langsung (*direct investment*) merupakan investasi yang melibatkan pihak investor secara langsung dalam operasional usaha yang dilaksanakan, sehingga dinamika usaha yang menyangkut kebijakan perusahaan yang ditetapkan, tujuan yang hendak dicapai, tidak lepas dari pihak yang berkepentingan (investor asing). Sedangkan investasi tidak langsung (portofolio)

merupakan investasi keuangan yang dilakukan di luar negeri. Investor membeli utang atau ekuitas dengan harapan mendapat manfaat finansial dari investasi tersebut. Bentuk investasi portofolio yang sering ditemui adalah pembelian obligasi/saham dalam negeri oleh orang/perusahaan asing (Ambarsari, 2005).

Penanaman modal asing memberikan peranan dalam pembangunan ekonomi di negara-negara sedang berkembang dalam berbagai bentuk. Modal asing mampu mengurangi kekurangan tabungan dan melalui pemasukan peralatan modal dan bahan mentah, dengan demikian menaikkan laju pemasukan modal. Selain itu tabungan dan investasi yang rendah mencerminkan kurangnya modal di negara keterbelakangan teknologi (Iqbal, 2013). Bersamaan dengan modal uang dan modal fisik, modal asing yang membawa serta keterampilan teknik, tenaga ahli, pengalaman organisasi, informasi pasar, teknik-teknik produksi maju, pembaharuan produk dan lain-lain. Selain itu juga melatih tenaga kerja setempat pada keahlian baru. Semua ini pada akhirnya akan mempercepat pembangunan ekonomi negara terbelakang. Sebagai dampak dari penanaman modal asing, kita dapat mengatakan bahwa pengadaan prasarana negara, pendirian industri baru, pemanfaatan sumber-sumber baru, kesemuanya cenderung meningkatkan kesempatan kerja dalam perekonomian. Dengan kata lain impor modal menciptakan lebih banyak pekerjaan. Keadaan ini menjadi suatu keuntungan dengan adanya penanaman modal asing.

Dalam Jhingan (2003), Harrod dan Domar menyatakan bahwa kunci terpenting dalam pertumbuhan ekonomi ialah investasi. Peranan investasi dalam pertumbuhan ekonomi memiliki watak ganda, pertama investasi menciptakan pendapatan dan kedua investasi memperbesar kapasitas produksi perekonomian dengan cara meningkatkan stok modal. Oleh sebab itu, ketika investasi masih berlangsung, pendapatan yang ada dan output akan secara terus menerus

semakin membesar. Investasi dapat menjadi titik tolak bagi keberhasilan dan keberlanjutan pembangunan di masa depan karena dapat menyerap tenaga kerja, sehingga dapat membuka kesempatan kerja baru bagi masyarakat yang pada gilirannya akan berdampak terhadap peningkatan pendapatan masyarakat. Investasi merupakan pembentukan modal yang dapat meningkatkan perekonomian di suatu wilayah. Makin tingginya nilai investasi yang dikelola maka kondisi perekonomian suatu wilayah akan semakin meningkat dan itu pasti meningkatkan pertumbuhan ekonomi (Octavianingrum dkk, 2015). Dalam perhitungan pendapatan nasional, pengertian investasi adalah seluruh nilai pembelian para pengusaha atas barang-barang modal dan pembelanjaan untuk mendirikan industri dan pertambahan dalam nilai stok barang perusahaan yang berupa bahan baku, barang dalam proses, dan barang jadi (Adriansyah, 2014).

Di dalam teori yang dikemukakan oleh Harrod-Domar, peran pembentukan modal disini sangat penting untuk menumbuhkan suatu perekonomian. Pembentukan modal dianggap sebagai pengeluaran mampu untuk menambah potensi suatu perekonomian dalam menghasilkan beberapa barang dan dapat pula dianggap sebagai pengeluaran yang mampu untuk menambah permintaan yang efektif bagi seluruh masyarakat. Inti dari teori Harrod-Domar ini yaitu, di dalam perekonomian suatu Negara dapat menyisihkan pendapatannya untuk mengganti beberapa barang modal yang telah rusak menjadi baru. Oleh Karena ini untuk meningkatkan perekonomian suatu Negara perlu adanya investasi baru (Todaro, 2006).

Sementara itu, menurut Mankiw (2003), PMA pada hakekatnya termasuk dalam faktor kegiatan pembangunan ekonomi. PMA merupakan suatu cara yang dapat diupayakan oleh pemerintah dan masyarakat untuk meningkatkan



pertumbuhan Produk Domestik Regional Bruto (PDRB) untuk jangka panjang yang dapat menaikkan standar hidup masyarakatnya.

Peningkatan PMA akan meningkatkan modal perekonomian dalam suatu wilayah sehingga akan meningkatkan proses produksi barang maupun jasa dalam prosesnya. Tujuan lain dari Penanaman modal yakni untuk mewujudkan alat-alat produksi yang nantinya akan mendorong kegiatan produksi di masa yang akan datang dan dapat meningkatkan Produk Domestik Regional Bruto itu sendiri. Hal ini sesuai dengan hasil penelitian Didu (2017) bahwa penanaman modal asing berpengaruh positif dan signifikan terhadap pertumbuhan ekonomi. Penelitian Fatimah, dkk (2022) menunjukkan bahwa tujuan dari penyelenggaraan investasi Penanaman Modal Asing (PMA) di Indonesia untuk meningkatkan pertumbuhan ekonomi dapat dicapai. dikarenakan Penanaman Modal Asing dapat mewujudkan sebuah lapangan kerja sehingga hal tersebut menambah lapangan pekerjaan yang besar sehingga mengurangi angka pengangguran dan dapat memberikan sebuah keterampilan yang baru untuk negara berkembang. Penanaman Modal Asing dapat dijadikan sebagai sumber tabungan, karena pertumbuhan ekonomi meningkat dikarenakan investor asing menanam modalnya.

## **2.2 Hubungan antar Variabel**

### **2.2.1 Hubungan Pengeluaran Pemerintah dan Output**

Kebijakan pengeluaran pemerintah merupakan bagian dari kebijakan fiskal sebagai salah satu bentuk intervensi pemerintah dalam perekonomian. Dengan menggunakan kebijakan ini, pemerintah dapat melakukan pengeluaran untuk memperoleh barang dan jasa guna memenuhi kebutuhan publik melalui mekanisme pengadaan barang dan jasa yang dilakukan oleh pemerintah. Pengeluaran pemerintah bertujuan untuk meningkatkan kapasitas produksi dalam proyek-proyek yang mengacu pada pertumbuhan ekonomi, pemerataan

pendapatan, peningkatan kesejahteraan, dan program yang menyentuh langsung kawasan yang terbelakang. Menurut teori Keynes, dengan perluasan belanja/pengeluaran pemerintah dapat mempercepat pertumbuhan ekonomi karena mendukung peningkatan output agregat. Peningkatan pengeluaran pemerintah akan meningkatkan permintaan agregat yang pada akhirnya akan meningkatkan output dan kesempatan kerja.

Pengeluaran pemerintah merupakan alat intervensi pemerintah terhadap perekonomian yang dianggap paling efektif. Tingkat efektifitas pengeluaran pemerintah dapat diukur melalui seberapa besar pertumbuhan ekonomi yang dapat dicapai. Hal ini disebabkan karena pengeluaran pemerintah lebih berkaitan erat dengan anggaran pendapatan dan belanja daerah (APBD), dimana secara langsung akan mempengaruhi penerimaan daerah dan pembiayaan-pembiayaan daerah, sehingga akan mempengaruhi pertumbuhan ekonomi secara langsung (Yuliarmi,dkk, 2014). Kebijakan fiskal yang ekspansif dengan cara meningkatkan pengeluaran pemerintah mengakibatkan output meningkat (Yunisvita, 2013). Hal ini mengakibatkan pendapatan disposibel perseorangan akan meningkat sehingga konsumsinya juga meningkat. Dengan asumsi tabungan dianggap tetap, secara agregat hal ini akan meningkatkan konsumsi agregat dan akan meningkatkan output. Begitu juga sebaliknya dengan kebijakan fiskal yang kontraktif. Kebijakan fiskal yang kontraktif yaitu dengan cara menurunkan pengeluaran pemerintah tentunya akan mengurangi output.

Melalui pengeluaran pemerintah yang mempengaruhi pertumbuhan output juga akan mempengaruhi output gap. Pada kondisi output gap positif yaitu output aktual lebih kecil daripada output potensial, pemerintah perlu meningkatkan pengeluarannya seperti belanja publik atau melakukan investasi dalam proyek-proyek infrastruktur. Dalam jangka pendek hal ini dapat berdampak positif pada

permintaan agregat melalui efek multiplier (Garry dan Rivas, 2017). Efek multiplier terjadi ketika perubahan dalam pengeluaran pemerintah menyebabkan peningkatan atau penurunan yang lebih besar dari output ekonomi secara keseluruhan daripada jumlah perubahan pengeluaran awal.

### **2.2.2 Hubungan Kredit Umum dan Output**

Dalam kaitan sektor perbankan, kebijakan pemerintah diarahkan untuk membiayai sektor-sektor ekonomi guna peningkatan produktivitas. Kredit memiliki hubungan kausalitas yang positif dengan pertumbuhan ekonomi. Hubungan timbal balik tersebut terjadi karena semakin tinggi kredit yang disalurkan, akan mendorong pertumbuhan ekonomi pada sektor yang tersebut dan akhirnya dapat meningkatkan pertumbuhan ekonomi. Dalam hal ini, kredit digunakan sebagai penggerak pertumbuhan ekonomi, dimana kredit berfungsi dalam pertumbuhan ekonomi. Selain itu, dengan kredit, perbankan diharapkan mampu mendorong pertumbuhan ekonomi sehingga terciptanya lapangan kerja baru baik melalui perluasan produksi ataupun melalui pengaruhnya dalam mendorong munculnya usaha baru. Salah satu peran kredit dalam mendukung pertumbuhan ekonomi adalah dengan mengalokasikan pemberian kredit menurut prioritas pembangunan ekonomi sehingga dapat memperluas pemerataan hasil pembangunan (Fahriyansyah, 2018).

Implikasi kredit perbankan terhadap pembangunan ekonomi setidaknya berpengaruh pada dua hal. Dalam hal ini, kredit yang dimaksud adalah gabungan dari kredit yang disalurkan oleh perbankan, seperti kredit modal kerja, kredit investasi dan kredit konsumsi. Pertama, kredit perbankan mampu meningkatkan konsumsi dan daya beli masyarakat melalui kredit konsumsi yang digunakan untuk memenuhi kebutuhan pribadi. Kedua, kredit perbankan berperan dalam mendorong peningkatan pembiayaan investasi dan modal unit usaha sehingga

kapasitas dan produktivitas perekonomian menjadi lebih besar. Dari kedua hal tersebut efek selanjutnya dari kredit perbankan adalah adanya peningkatan pendapatan nasional akibat dari meningkatnya konsumsi dan investasi masyarakat secara keseluruhan sehingga tercapainya pertumbuhan ekonomi dan pertumbuhan output.

Pertumbuhan kredit menunjukkan peningkatan atau penurunan jumlah seluruh kredit yang dipinjam dari beberapa periode waktu atau bisa dalam bentuk persentase. Bila terjadi peningkatan pertumbuhan kredit maka merupakan fenomena umum yang normal sebagai akibat dari peningkatan *financial deepening* yang terjadi dalam perekonomian. Peningkatan kredit terutama kredit konsumsi dapat memicu pertumbuhan permintaan agregat atau output aktual di atas output potensial yang mengakibatkan perekonomian memanas yang pada gilirannya juga akan berdampak pada peningkatan inflasi. Ketika bank kurang berhati-hati dalam memberikan kredit kepada golongan berisiko tinggi menimbulkan pemupukan pinjaman yang berpotensi menjadi bad loans (Utari, et al, 2012). Hal ini berarti bahwa peningkatan kredit yang dilakukan oleh perbankan dapat mempengaruhi output gap.

### **2.2.3 Hubungan Pembiayaan Syariah dan Output**

Pembiayaan perbankan syariah adalah salah satu kegiatan perbankan dalam menunjang kegiatan ekonomi suatu negara. Apabila pembiayaan yang diberikan dialokasikan ke dalam bentuk usaha yang produktif maka hal tersebut dapat membantu dalam meningkatkan pertumbuhan ekonomi suatu negara. Sektor keuangan memegang peranan yang sangat signifikan dalam memicu pertumbuhan ekonomi suatu negara. Sektor keuangan menjadi lokomotif pertumbuhan sektor riil via akumulasi kapital dan inovasi teknologi. Lebih tepatnya, sektor keuangan mampu memobilisasi tabungan. Mereka menyediakan para

peminjam berbagai instrumen keuangan dengan kualitas tinggi dan resiko rendah. Hal ini akan menambah investasi dan akhirnya mempercepat pertumbuhan ekonomi.

Dalam mendorong pertumbuhan ekonomi, sektor keuangan mempunyai kedudukan penting dikarenakan fungsi perbankan yang bertindak sebagai manajer investasi dan investor dapat mendukung pengembangan sektor riil, baik dalam rangka meningkatkan iklim usaha maupun iklim investasi serta juga penciptaan lapangan kerja. Fungsi perbankan dalam menghimpun dan memobilisasi dana-dana masyarakat atau perusahaan kemudian disalurkan pada usaha-usaha produktif berpengaruh positif terhadap peningkatan pertumbuhan ekonomi nasional (Deti dkk, 2017). Penyaluran dana masyarakat dari perbankan memiliki pengaruh sangat besar bagi pengusaha kecil, pengusaha besar, maupun masyarakat secara umumnya (Syahputra dan Ningsih, 2020). Pembiayaan syariah membuka peluang pembiayaan bagi kegiatan usaha berdasarkan prinsip kemitraan/*partnership*. Berkembangnya usaha mikro di Indonesia akan meningkatkan jumlah tenaga kerja yang kemudian akan berdampak pada produktivitas dalam menghasilkan output.

Pembiayaan syariah menekankan pada prinsip kemitraan dan bagi hasil yang memotivasi pihak pemberi dana untuk berinvestasi dalam bisnis yang potensial dan menghasilkan (Jamili, 2017). Hal ini dapat mengarah pada alokasi dana yang lebih efisien dan meningkatkan potensi pertumbuhan ekonomi. Pembiayaan syariah juga memperluas akses keuangan bagi seluruh masyarakat, termasuk mereka yang tidak memiliki akses ke sistem keuangan konvensional. Hal ini dapat meningkatkan tingkat investasi dan konsumsi, yang pada gilirannya memperkuat pertumbuhan ekonomi. Selain itu, pembiayaan syariah memfokuskan pada bisnis dan usaha kecil, yang merupakan sumber utama pertumbuhan

ekonomi dalam banyak negara. Oleh karena itu, pembiayaan syariah dapat membantu memperkuat sektor ini dan meningkatkan pertumbuhan ekonomi.

#### **2.2.4 Hubungan Penanaman Modal Asing dan Output**

Teori pertumbuhan yang dikemukakan oleh Harrod dan Domar menyatakan bahwa investasi memegang peranan penting dalam proses pertumbuhan ekonomi. Hal ini dikarenakan investasi mempunyai dua sifat yaitu menciptakan pendapatan dan memperbesar kapasitas produksi perekonomian dengan cara meningkatkan stok modal. Oleh sebab itu, ketika investasi masih berlangsung, pendapatan yang ada dan output akan secara terus menerus semakin membesar (Jhingan, 2003). Inti dari teori Harrod-Domar ini yaitu, di dalam perekonomian suatu Negara dapat menyisihkan pendapatannya untuk mengganti beberapa barang modal yang telah rusak menjadi baru. Oleh Karena ini untuk meningkatkan perekonomian suatu Negara perlu adanya investasi baru (Todaro, 2006).

Penanaman Modal Asing (PMA) pada hakekatnya termasuk dalam faktor kegiatan pembangunan ekonomi. PMA merupakan suatu cara yang dapat diupayakan oleh pemerintah dan masyarakat untuk meningkatkan pertumbuhan Produk Domestik Regional Bruto (PDRB) untuk jangka panjang yang dapat menaikkan standar hidup masyarakatnya (Mankiw, 2003). Peningkatan PMA akan meningkatkan modal perekonomian dalam suatu wilayah sehingga akan meningkatkan proses produksi barang maupun jasa dalam prosesnya. Tujuan lain dari penanaman modal yakni untuk mewujudkan alat-alat produksi yang nantinya akan mendorong kegiatan produksi di masa yang akan datang dan dapat meningkatkan PDRB itu sendiri.

Dalam upaya pembangunan ekonomi modal memegang peranan penting, karena akumulasi modal akan menentukan cepat atau lambatnya pertumbuhan

ekonomi dan mencerminkan marak lesunya pembangunan ekonomi suatu daerah. Dimana investasi itu dapat dilakukan dengan cara menghimpun akumulasi modal untuk membangun sejumlah gedung dan peralatan yang berguna bagi kegiatan produktif, maka output potensial suatu bangsa akan bertambah dan pertumbuhan ekonomi jangka panjang juga akan meningkat. Penanaman modal asing memainkan peranan penting dalam menentukan jumlah output dan pendapatan. Dengan semakin besarnya investasi baik maka diharapkan akan mendorong pertumbuhan sektor swasta dan rumah tangga dalam mengalokasikan sumber daya yang ada di suatu daerah. Hal ini pada akhirnya akan menyebabkan makin meningkatnya PDRB dan diharapkan pertumbuhan ekonomi daerah dapat meningkat. Dengan demikian penanaman modal asing memiliki hubungan positif terhadap pertumbuhan ekonomi suatu daerah. Sementara itu, menurut Samuelson (2004), investasi mengarah kepada akumulasi modal. Penambahan stok bangunan, gedung, mesin-mesin dan peralatan penting lainnya akan meningkatkan output potensial suatu wilayah dan merangsang pertumbuhan ekonomi untuk jangka panjang. Dengan demikian, investasi memainkan dua peran yakni mempengaruhi output jangka pendek melalui dampaknya terhadap permintaan agregat dan mempengaruhi laju pertumbuhan output jangka panjang melalui dampak pembentukan modal terhadap output potensial dan penawaran agregat (Samuelson dan Nardhaus, 1994). Oleh karena itu, melalui penanaman modal yang berpengaruh terhadap output potensial, maka hal tersebut akan mempengaruhi output gap. Hal ini terjadi karena apapun yang mempengaruhi output potensial akan ikut mempengaruhi output gap karena output potensial merupakan bagian dari estimasi untuk menentukan output gap.

### **2.3 Tinjauan Empiris**

Penelitian M Zahari (2017) yang berjudul Pengaruh pengeluaran pemerintah terhadap pertumbuhan ekonomi di Provinsi Jambi dengan regresi metode Ordinary Least Square (OLS). Hasil penelitian menunjukkan bahwa pengeluaran pemerintah berpengaruh secara signifikan dan positif terhadap pertumbuhan ekonomi Provinsi Jambi.

Penelitian Mubasyir Jamili (2017) yang berjudul Analisis Pengaruh Pembiayaan Bank Syariah, Investasi dan Belanja Pemerintah terhadap Pertumbuhan Ekonomi di Indonesia. Penelitian ini menggunakan metode Regresi Linier Berganda dan Ordinary Least Square (OLS). Hasil penelitian menunjukkan bahwa Pembiayaan Bank Syariah dan Belanja Pemerintah signifikan mempengaruhi Pertumbuhan ekonomi di Indonesia. Sementara itu, investasi tidak signifikan mempengaruhi Pertumbuhan Ekonomi di Indonesia.

Penelitian Mohammad Fahriansyah (2018) yang berjudul Pengaruh Kredit terhadap Pertumbuhan Ekonomi Indonesia (2010-2016) dengan metode Panel Data Statis menunjukkan bahwa kredit yang disalurkan memiliki pengaruh yang signifikan tetapi mempunyai hubungan negatif yang disebabkan oleh tidak seimbangnya pertumbuhan kredit dan output yang dihasilkan. Variabel lain yang berpengaruh signifikan dan memiliki hubungan positif adalah inflasi dan investasi, sedangkan infrastruktur dan tenaga kerja tidak signifikan mempengaruhi pertumbuhan ekonomi.

Penelitian Danil Syahputra dan Supiah Ningsih (2020) yang berjudul Pengaruh Kredit Perbankan Konvensional Dan Pembiayaan Perbankan Syariah Terhadap Pertumbuhan Ekonomi Indonesia dengan metode Regresi Linier Berganda. Hasil penelitian menunjukkan secara simultan variabel kredit



perbankan konvensional dan variabel pembiayaan perbankan syariah mempengaruhi variabel Produk Domestik Bruto (PDB).

Penelitian Kusdianti Fatimah, dkk (2022) yang berjudul Analisis Pengaruh Penanaman Modal Asing (PMA) Terhadap Pertumbuhan Ekonomi. Hasil penelitian menunjukkan bahwa Penanaman Modal Asing (PMA) sangat berpengaruh terhadap pertumbuhan ekonomi karena jika Penanaman Modal Asing (PMA) dalam suatu negara meningkat dari tahun ke tahun, maka hal tersebut dapat membuat berkembangnya pertumbuhan ekonomi dalam suatu negara, begitu juga sebaliknya.

Penelitian Amanus Khalifah Fil'ardy Yunus (2017) yang berjudul Efek Determinan Permintaan Agregat dan Penawaran Agregat terhadap Rasio Pengorbanan di Indonesia (2016-2014) menggunakan data rasio pengorbanan yang diperoleh dari hasil regresi modifikasi persamaan kurva Philips dimana rasio pengorbanan ini dapat dipersamakan dengan output gap. Metode analisis yang digunakan adalah metode estimasi persamaan simultan.

Penelitian Damhuri Nasution dan Anton Hendranata (2014) yang berjudul Estimasi Output Gap Indonesia. Penelitian ini menggunakan pendekatan univariate (HP Filter, Band Pass Filter, ARIMA + HP Filter) maupun multivariate (Fungsi Produksi, SVAR) dalam mengestimasi output gap. Hasil penelitian menunjukkan model terbaik dalam menjelaskan estimasi output potensial perekonomian Indonesia digunakan pendekatan kurva Phillips yang menjelaskan hubungan inflasi dengan output gap.

## **2.4 Kerangka Konseptual**

Kerangka konseptual penelitian menjelaskan secara teoritis hubungan antara variabel bebas (X) dengan variabel terikat (Y) yang akan di teliti dalam penelitian ini. Adapun kerangka konseptual dalam penelitian ini adalah

bagaimana pengaruh variabel kebijakan moneter, kebijakan fiskal, dan penanaman modal asing terhadap output gap di Provinsi Sulawesi Selatan.

Peran pemerintah melalui kebijakan fiskal sangat diperlukan untuk mengendalikan tingkat inflasi. Kebijakan fiskal ekspansif dengan cara meningkatkan pengeluaran pemerintah meningkatkan output. Pengeluaran pemerintah yang meningkat mengakibatkan pendapatan disposibel perseorangan akan meningkat sehingga konsumsinya juga meningkat. Dengan asumsi tabungan dianggap tetap, secara agregat hal ini akan meningkatkan konsumsi agregat dan akan meningkatkan output. Begitu juga sebaliknya dengan kebijakan fiskal yang kontraktif. Kebijakan fiskal yang kontraktif yaitu dengan cara menurunkan pengeluaran pemerintah tentunya akan mengurangi output.

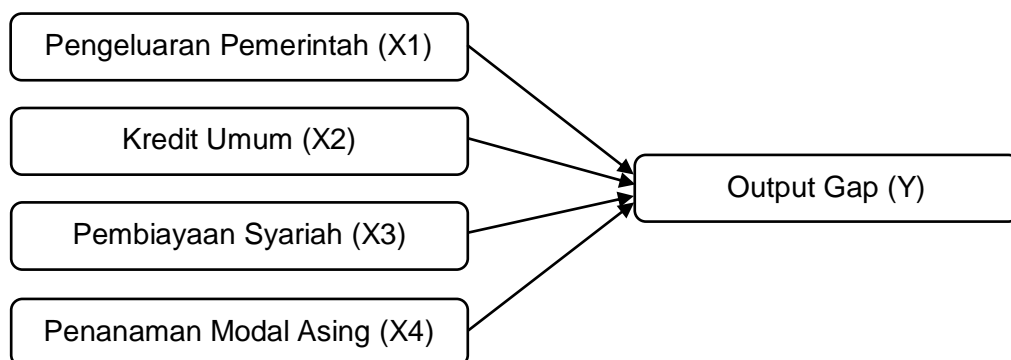
Kredit perbankan terhadap pembangunan ekonomi setidaknya berpengaruh pada dua hal. Pertama, kredit perbankan mampu meningkatkan konsumsi dan daya beli masyarakat melalui kredit konsumsi yang digunakan untuk memenuhi kebutuhan pribadi. Kedua, kredit perbankan berperan dalam mendorong peningkatan pembiayaan investasi dan modal unit usaha sehingga kapasitas dan produktivitas perekonomian menjadi lebih besar. Efek selanjutnya dari kredit perbankan adalah adanya peningkatan pendapatan nasional akibat dari meningkatnya konsumsi dan investasi masyarakat secara keseluruhan sehingga tercapainya pertumbuhan ekonomi dan pertumbuhan output.

Pembiayaan syariah menekankan pada prinsip kemitraan dan bagi hasil yang memotivasi pihak pemberi dana untuk berinvestasi dalam bisnis yang potensial dan menghasilkan. Hal ini dapat mengarah pada alokasi dana yang lebih efisien dan meningkatkan potensi pertumbuhan ekonomi. Pembiayaan syariah juga memperluas akses keuangan bagi seluruh masyarakat, termasuk mereka yang tidak memiliki akses ke sistem keuangan konvensional. Hal ini dapat

meningkatkan tingkat investasi dan konsumsi, yang pada gilirannya memperkuat pertumbuhan ekonomi.

Penanaman Modal Asing (PMA) merupakan suatu cara yang dapat diupayakan oleh pemerintah dan masyarakat untuk meningkatkan pertumbuhan Produk Domestik Regional Bruto (PDRB) untuk jangka panjang yang dapat menaikkan standar hidup masyarakatnya. Peningkatan PMA akan meningkatkan modal perekonomian dalam suatu wilayah sehingga akan meningkatkan proses produksi output barang maupun jasa dalam prosesnya. Tujuan lain dari Penanaman modal yakni untuk mewujudkan alat-alat produksi yang nantinya akan mendorong kegiatan produksi di masa yang akan datang dan dapat meningkatkan PDRB itu sendiri.

Berdasarkan uraian di atas, maka pengaruh dari masing-masing variabel independen terhadap variabel dependen dapat digambarkan pada gambar di bawah ini:



Gambar 2.1 Kerangka Konseptual Penelitian

## 2.5 Hipotesis Penelitian

Berdasarkan kerangka konseptual yang telah dijelaskan dan digambarkan sebelumnya, maka dapat dirumuskan hipotesis penelitian sebagai berikut:

1. Diduga pengeluaran pemerintah berpengaruh negatif terhadap output gap Provinsi Sulawesi Selatan.
2. Diduga kredit umum berpengaruh negatif terhadap output gap Provinsi Sulawesi Selatan.
3. Diduga pembiayaan syariah berpengaruh negatif terhadap output gap Provinsi Sulawesi Selatan.
4. Diduga penanaman modal asing (PMA) berpengaruh negatif terhadap output gap Provinsi Sulawesi Selatan.